

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MAJU DAN MANDIRI (P2DM2) DI KABUPATEN JEMBER

Triasih Farida J. Trisniati

S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : triasihfarida@gmail.com

ABSTRAK

Program pengembangan desa maju dan mandiri adalah desa yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dipedesaan, dengan pengembangan kemampuan sosial terutama pada indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola aset, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tentang IDM dan SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa membuat program pengembangan desa maju dan mandiri dan mencantumkan dalam Renstra. Program pengembangan desa maju dan mandiri memberikan arah bagi kebijakan pembangunan kemandirian Desa di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dari penelitian ini bidang pemerintahan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember, pendamping desa dan sekretaris desa khususnya Desa Puger Kulon dan Puger Wetan yang menjadi tujuan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini program pengembangan desa maju dan mandiri dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III. Dimana model ini yang dapat dipakai dalam pengimplementasian kebijakan atau program pemerintah.

Kata Kunci : *Implementasi Program, Program Pengembangan Desa Maju dan Mandiri*

IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT AND INDEPENDENT VILLAGE PROGRAM (P2DM2) IN JEMBER DISTRICT

Triasih Farida J. Trisniati

S1 Government Science, Faculty of Social and Political Sciences

Muhammadiyah University of Jember

Email: triasihfarida@gmail.com

ABSTRACT

The advanced and independent village development program is a village that has the ability to improve the independence of the community in the countryside, by developing social capabilities, especially on key indicators that include the ability of poor families to obtain livelihoods, fulfill basic needs, manage assets, participate in community activities, as well as ability in facing shocks and pressure. Based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Permendes Regional Development Disadvantaged and Transmigration about IDM and Decree of Director General of PPMD No. 30 of 2016 concerning Status of Progress and Independence of the Village. The Village and Community Empowerment Service makes a developed and independent village development program and includes it in the Strategic Plan. Advanced and independent village development programs provide direction for future village self-reliance development policies. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The sources of this research are village government Jember District Community and Village Empowerment Office, village facilitator and village secretary, especially Puger Kulon Village and Puger Wetan, were the objectives of this study. Data collection techniques used in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis is done by collecting data, presenting data and conclusions. The results of this study are developed and independent village development programs using the George C. Edward III implementation model. Where this model can be used in implementing government policies or programs.

Keywords: *Program Implementation, Advanced and Independent Village Development Programs*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa merupakan entitas dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki arti yang sangat strategis untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak masyarakat. Perlunya melaksanakan pembangunan di desa untuk dapat memperlancar pemenuhan kebutuhan publik dalam pelayanan. Pentingnya dalam memperkuat pembangunan desa dengan strategi mengembangkan desa maju dan mandiri untuk memperkecil angka perbedaan sosial, ekonomi dan dapat mengangkat derajat masyarakat desa yang selama ini terkesan memprihatinkan. Kebijakan pemerintah tentang program pengembangan desa maju dan mandiri sangatlah baik dan mendapat dukungan. Salah satu konsep membangun desa maju dan mandiri adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam Undang-Undang Desa ini, pemerintah ingin

memberikan tempat yang memadai dan leluasa untuk desa dapat berkembang dengan sistem demokrasi agar desa dapat meningkatkan kesejahteraannya, agar terciptanya pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Undang-Undang Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Desa di sini dijelaskan, “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Undang-

Undang Desa menyebut dengan jelas tentang pengertian desa, prinsip dan tujuan pembangunan desa yang mengedepankan posisi desa dengan kewenangannya berdasar hukum. Maka diperlukannya pembenahan dalam upaya peningkatan Desa karena hingga saat ini desa di pelosok masih ada desa-desa yang tertinggal.

Kabupaten Jember sendiri salah satu kabupaten yang penduduknya cukup padat di Jawa Timur dimana Kabupaten Jember memiliki 2.858.142 jiwa pada tahun 2018 yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 248 Kelurahan/Desa. Dari 248 desa tentunya saat ini tidak semua desa mandiri atau maju terutama didaerah-daerah pelosok. Sampai saat ini dari data kondisi desa-desa di Kabupaten Jember hanya ada satu desa yang masih sangat tertinggal, 46 desa tertinggal, 114 desa berkembang dan 60 desa maju data terakhir yang disahkan oleh kementerian desa. Upaya pemerintah Kabupaten Jember saat ini dibantu dengan adanya pendamping desa untuk meningkatkan status desa-desa di Kabupaten Jember melalui

pembangunan desa maupun pemberdayaan desa.

Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui pembangunan desa diharapkan masyarakat desa memiliki jaminan hidup yang sejahtera dalam pedesaan. Tidak hanya melalui pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tetapi melalui pemberdayaan masyarakat Desa juga yang artinya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Seperti halnya Desa Puger Kulon yang berstatus desa mandiri dan Desa Puger Wetan yang

berstatus desa maju saat ini, yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh apa yang telah terjadi dan bagaimana sesungguhnya penerapan program pengembangan desa maju dan mandiri di Kabupaten Jember. Oleh karena itu penelitian peneliti kali ini merumuskan tentang bagaimana

METODE

Dalam Penelitian Implementasi Program Pengembangan Desa Maju Dan Mandiri (P2DM2) Di Kabupaten Jember peneliti menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja, tetapi juga menganalisis serta menginterpretasikan tentang arti data tersebut.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Pengembangan Desa Maju Dan Mandiri (P2DM2) Di Kabupaten

penerapan/pengimplementasian program pengembangan dalam desa maju dan mandiri khususnya di daerah Kabupaten Jember. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Implementasi Program Pengembangan Desa Maju Dan Mandiri (P2DM2) Di Kabupaten Jember”.

Jember. Implementasi Program Pengembangan Desa Maju Dan Mandiri (P2DM2) Di Kabupaten Jember berdasarkan teori George C. Edward III, teori ini terdiri dari 4 elemen yakni : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa selaku pelaksanaan tugas pembantuan program tersebut, Desa Puger Kulon yang berstatus desa mandiri dan Desa Puger Wetan yang berstatus desa maju didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa dinas tersebut merupakan tim pelaksana program pengembangan desa maju dan mandiri. Dan untuk kedua desa itu sendiri bahwasanya dalam data mengalami kenaikan pada tahun 2018 yang pada sebelumnya pada

tahun 2017 mengalami penurunan. Sehingga peneliti ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program pengembangan desa maju dan mandiri. Untuk subyek penelitian ini adalah Bapak Najib selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa sekaligus wakil ketua pelaksana program pengembangan desa maju dan mandiri dengan kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Jember. Bapak Ahmad Fourzan selaku koordinator pendamping desa di Kabupaten Jember, Bapak Mama Sudarma selaku staff bidang pendamping desa, Bapak Saiful Hoji selaku sekretaris Desa Puger Kulon, dan Bapak Dwi Hendardi selaku sekretaris Desa Puger Wetan. Jenis data yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif serta untuk sumber datanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan, yakni mengentaskan 5000 (lima ribu) Desa Tertinggal dan

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer.

Peneliti dalam observasi dan wawancara di lapangan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, alat tulis, kamera (dokumentasi), perekam suara dan media Internet. Dan beberapa cara teknik pengumpulan data yang dapat peneliti lakukan dengan penunjang instrumen penelitian adalah melalui observasi yaitu melakukan pengamatan langsung tentang keadaan di lapangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analisis yang dikembangkan Milles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2014:338) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. meningkatkan sedikitnya 2000 (dua ribu) Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut

dapat mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri dalam mengelolapembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut. Tujuan pembangunan Desa yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan program yang sama yakni Program Pengembangan Desa Maju Dan Mandiri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bidang Pemerintahan Desa. Untuk tolak ukur dalam mengetahui status Desa menggunakan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta mempermudah bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan

kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Desa, penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa. Menjadi bahan penyusunan target lokasi berbasis desa dan menjadi instrumen koordinaasi dengan Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain. Melalui Indeks Membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian Desa tergambar dengan status Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Kabupaten Jember sendiri terdiri dari 226 Desa dan melaksanakan kegiatan program Indeks Desa Membangun sesuai dengan program Kementrian Desa pula yakni, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

IDM sebagai potret dari perkembangan pembangunan kemandirian desa digunakan untuk:

1. Memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan jenis indeks lainnya, seperti indeks keadilan gender, indeks demokrasi, indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus desa
2. Bahan advokasi di tingkat pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, maupun desa dalam mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian desa
3. Penentuan peringkat desa dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
5. Merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik

Analisa hasil nilai skor dari seluruh indikator mewakili 3 variabel (Pemerintah, masyarakat, wilayah) pada pilihan keterwakilan sektor strategis yang dapat mewakili dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi.

Peneliti akan menjabarkan penelitian implementasi program pengembangan desa maju dan mandiri (P2DM2) di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi secara mendalam berdasarkan teori George C. Edward III, teori initerdiri dari 4 elemen yakni : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peniliti ada 4 indikator yang ditemukan dalam lapangan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi dalam hal ini koordinasi dalam pelaksanaan pemutakhiran data Indek Desa Membangun (IDM) guna mengetahui informasi status di desa-desa Kabupaten Jember. Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tentunya telah melakukan program pengembangan desa maju dan

mandiri sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi sampai dengan Bupati Jember untuk mengetahui status desa di Kabupaten Jember. Pelaksanaan program tersebut tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat saja akan tetapi dilaksanakan juga oleh Pendamping Desa, Sekretaris Desa Dan KPMD. Dalam program ini pendamping desa ikut andil dalam melakukan komunikasi agar berjalan dengan efektif dan baik program ini dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses pengembangan kepada desa guna mendorong setiap desa melakukan perencanaan guna meningkatkan status desa menjadi maju dan mandiri. Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data untuk mengetahui status setiap desa di Kabupaten Jember setiap desa menunggu surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Para sekretaris desa, KPMD dan Pendamping Desa mengikuti sosialisasi pemaparan tentang Indeks Desa Membangun (IDM) lalu selanjutnya melakukan pemutakhiran data di setiap desa masing-masing

desa selama 3 (tiga) hari kemudian hasil data diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa guna untuk diakumulasikan.

Keadaan dimensi sosial di Desa Puger Kulon sebagai desa Mandiri dalam segi komunikasi dengan masyarakat untuk menjalankan program pengembangan desa maju dan mandiri. Dimana ada beberapa variabel didalam dimensi sosial yakni :

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Modal sosial
4. Pemukiman

Begitu pula dalam segi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi meliputi empat variabel diatas pula. Komunikasi sesungguhnya yang ada dalam dinas maupun sampai desa sering terjadinya kesalah pahaman seperti dalam hal pelaksanaan program sering tidak cocoknya pendapat antara atasan dengan staff dalam menjalankan sebuah kegiatan sehingga sedikit terjadinya kendala dalam hal itu. Sedangkan dalam komunikasi antara dinas dengan desa-desa sering terabaikan oleh desa seperti batas pengumpulan kuisioner

untuk pemutakhiran data tidak sesuai target yang telah ditentukan awal oleh dinas dengan alasan yang berbagai macam. Tidak hanya dinas dengan desa, beberapa pendamping saja mengakui bahwa ada beberapa desa yang sulit untuk ditangani sehingga pengumpulan data tidak sesuai dengan target awal. Sumber daya meliputi tentang staf, kemampuan, fasilitas, mengetahui apa yang harus dilakukan, mengontrol kepatuhan dan kewenangan. Staf yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember sudah cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan program tersebut meskipun sedikit kewalahan ketika pelaksanaan karena pesertadari puluhan kecamatan dan ratusan desa yang mengingat bahwa peserta kegiatan program ini seluruh Kabupaten Jember untuk staf di Desa sendiri sudah memadai. Tidaklah cukup hanya dengan jumlah sumber daya yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Para implementor harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani tugasnya. Karena, pelatihan yang tidak layak kepada staff dapat

menyebabkan masalah. Kemampuan yang dimiliki staf sudah memadai karena salah satu staf sebelumnya sudah mengikuti pelatihan untuk program ini dan untuk desa sendiri dilakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan pemutakhiran data. Informasi adalah sumber esensi kedua dalam implementasi kebijakan publik. Informasi ini memiliki dua bentuk, yang pertama adalah informasi yang berhubungan dengan bagaimana cara melaksanakan suatu kebijakan. Bentuk kedua adalah data pada pemenuhan lainnya dengan aturan pemerintah dan regulasi. Informasi program ini langsung dari pusat dan diteruskan sampai tingkat bawah dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Desa. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penyampain yang tepat pelaksanaan program pengembangan desa maju dan mandiri dalam kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun dapat terlaksana sesuai target yang telah direncanakan oleh pihak tugas pembantuan yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Jember. Disposisi atau kemauman

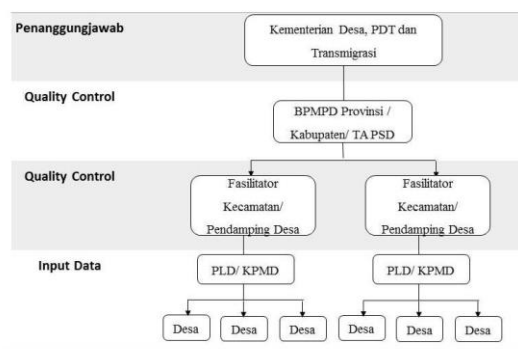
implementor dalam pelaksanaan juga berpengaruh dalam berjalannya sebuah implementasi kebijakan. Kemauan ini terlihat dimana para staf melakukan program ini berjalan seperti sebelum-sebelumnya dan para sekretaris desa, KPMD dan pendamping desa yang juga berperan penting dalam pengambilan pemutakhiran data untuk status desa masing-masing. Seperti pernyataan Pak Ahmad Fourzan selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Jember:

“ Pendamping Desa dalam proses perencanaan itu mendorong agar desa yang berstatus maju dan mandiri maka basis perencanaannya dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pengembangan, dalam konteks pengembangan itu dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2018 sudah memberikan acuan bahwa untuk desa-desa yang berkategori yang berstatus dan mandiri kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan, sehingga pendamping desa sifatnya

mengawal mulai dari proses penyusunan RKAPDes “ (wawancara dengan Bapak Ahmad Fourzan, 2 Januari 2019, di Dispemasdes)

Kekurangan salah satu dari mereka dapat menghambat berjalannya program ini sehingga dapat berjalan kurang efektif. Kelemahan dari peserta dalam disposisi hanya satu yakni tidak tepatnya waktu baik dalam datang saat sosialisasi sampai dengan pengumpulan berkas yang tidak sesuai tanggal yang telah ditetapkan oleh tim pelaksana. Struktur Birokrasi dalam pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan disana memiliki sumber daya yang memadai, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut masih menghalangi proses implementasi karena struktur organisasi yang dimiliki. Dua ciri utama dari birokrasi adalah standard operating procedures (SOPs) dan pembagian tugas. Dalam hal standard operating procedures (SOPs) sudah tertera dengan jelas didalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pelaksanaan

sebuah program ini sehingga tim pelaksana tugas pembantuan yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan dan menyampaikan sampai ketingkat desa. Dalam hal pembagian tugas sudah tertera dalam struktur pengorganisasian untuk pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) dibawah ini.



Bagan 4.3.4. Pengorganisasian Pemutakhirana Data Indeks Desa Membangun (IDM)

Sumber. Materi Petunjuk Indeks Desa Membangun (IDM)

1. Tingkat Pusat

Penanggung jawab pelaksana Tingkat Pusat merupakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penanggung jawab

tingkat pusat memiliki tugas yaitu :

- a. Merancang desain Pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun
- b. Merancang kuisisioner dan petunjuk pengisian kuisisioner data Indeks Desa Membangun
- c. Melakukan sosialisasipelaksanaan pemutakhiran data Indeks Desa Membanagun
- d. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan Pemuktahiran Data Indeks Data Membangun
- e. Membuat analisis dan pelaporan hasil Pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun

2. Tingkat Provinsi

Koordinator tingkat Provinsi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bersama BPMPD Kabupaten/Kota, koordinator Tingkat Provinsi dan Fasililator Kabupaten kegiatan generasi sehat dan cerdas bertanggungjawab atas penugasan Quality Controller BPMPD Kabupaten/Kota,

- Pendamping Desa, dan atau Pelaku GSC dalam pengumpulan data.
- b. Memastikan kegiatan Pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun dapat berjalan baik dan lancar
3. Tingkat Kabupaten/Kota Koordinator tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan tim petugas pemutakhiran data IDM di Desa.
 - b. Memastikan pemuktahiran data IDM dilaksanakan dengan benar.
4. Tingkat Kecamatan
- a. Memberikan penugasan kepada petugas Pemutakhiran data IDM, yang terdiri atas Pendamping Lokal Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau tenaga lain yang dilibatkan.
 - b. Melakukan Quality Control terhadap petugas Pemutakhiran Data IDM pada kegiatan Pemutakhiran Data IDM
- c. Melakukan pengecekan kembali dan verifikasi hasil input data.
5. Petugas Pemutakhiran data IDM di Desa Pendamping lokal desa, bertanggungjawab membantu aparat Desa dalam pengisian kuesioner di bawah koordinasi BPMPD Kabupaten/Kota dengan pengwasan BPMPD tingkat Provinsi. Bila terdapat pelaku GSC tingkat Desa, Pendamping Lokal Desa bekerjasama dengan pelaku GSC tingkat Desa.
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), bertanggungjawab membantu aparat desa dalam pengisian kuesioner jika tidak terdapat pendamping lokal desa, dibawah supervisi Fasilitator Kabupaten dan koordinator provinsi Program GSC (Generasi Sehat dan Cerdas). Petugas Pemutakhiran IDM memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membaca dan memahami pedoman, kuesioner dan panduan pengisian

- kuesioner Pemutakhiran Data IDM
2. Mengumpulkan data kuesioner Pemutakhiran Data
3. Mendampingi Aparat Desa (Sekertaris Desa) dalam pengisian kuesioner Pemutakhiran Data IDM
4. Melakukan observasi di Desa
5. Melakukan pengecekan kembali kelengkapan data yang terkumpul untuk menghindari ada data yang terlewat
6. Melakukan verifikasi dan validasi data yang terisi di kuesioner
7. Menginput data yang sudah terkumpul

Hasil status desa pada Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan dalam peningkatan pada tahun 2018 daripada tahun yang sebelumnya pada Desa Puger Kulon. Sedangkan Desa Puger Wetan mengalami peningkatan akan tetapi tidak terlalu besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan paling besar yang dialami Desa Puger Kulon terjadi pada peningkatan Ketahanan Indeks Lingkungan, sedangkan pada Desa Puger Wetan juga seperti itu mengalami peningkatan di Indeks Ketahanan Lingkungan.

Meskipun pada tahun 2018 tidak hanya Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan untuk desa yang lainnya di Kabupaten Jember status desanya meningkat. Akan tetapi dari

hasil data yang peneliti dapat pada tahun 2017 bahwasannya status desa di Kabupaten Jember mengalami penurunan yang meniingkat hanya lima desa saja. Hal tersebut membuktikan bagaimana pada tahun 2016 ke 2017 desa-desa di Kabupaten Jember rata-rata mengalami penurunan semua, seperti yang dialami Desa Puger Kulon maupun Desa Puger Wetan. Namun pemerintah baik mulai dari dinas sampai dengan desa berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi-potensi yang ada di desa guna terwujudnya desa yang maju dan mandiri. Walaupun tidak semua desa mampu mewujudkan itu semua dengan cepat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi program pengembangan Desa maju dan mandiri di Kabupaten Jember yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program pengembangan Desa maju dan mandiri di Kabupaten Jember berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan program pengembangan Desa maju dan mandiri di Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan program pengembangan Desa maju dan mandiri dengan kegiatan pemutakhiran data indikator Indeks Desa Membangun (IDM) kegiatan penguatan dikelembagaan Desa menuju Desa maju dan mandiri. Dinas sudah melakukan intruksi dengan baik akan tetapi ada beberapa kendala

tentang beberapa desa yang tidak datang dalam kegiatan ini dan ada yang terlambat dalam pengumpulan pemutakhiran data dari jadwal yang telah ditentukan.

2. Sumberdaya untuk pelaksanaan program pengembangan desa maju dan mandiri baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa maupun dari Desa Puger Wetan dan Puger Kulon sudah memadai akan tetapi fasilitas di Desa Puger Wetan maupun Puger Kulon ada beberapa yang belum ada atau masih dalam pemrosesan sehingga masyarakat Desa Puger Wetan memakai fasilitas yang ada di Desa Puger Kulon begitupun sebaliknya.
3. Disposisi atau kemauan para pelaksana program merupakan salah satu variabel yang terpenting pula dalam keefektifan sebuah program. Meskipun semua elemen mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai

- penyelenggara tugas pembantuan oleh pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa untuk melaksanakan
4. Seperti yang telah peniliti temukan dilapangan dimana terjadinya kewalahan saat menanggapi program tersebut karena tim panitia tidak sebanding dengan pesertas yang hadir sehingga ada beberapa tugas yang seharusnya dilakukan satu orang menjadi beberapa orang yang menjalankan karena keterbatasan sumberdaya.
 5. Struktur birokrasi baik dari dinas sampai desa sudah memadai untuk menjalankan program tersebut. Dalam program ini juga tidak melibatkan instansi yang lain atau badan organisasi lain.
 6. Hasil pemutakhiran data Desa Puger Kulon dari tahun 2016 sampai dan 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Desa Puger Kulon dengan status desa mandiri akan tetapi pada tahun 2017 mengalami
 7. Hasil pemutakhiran data Desa Puger Wetan juga sama dengan Desa Puger Kulon. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan, hanya saja penurunan yang dialami pada Desa Puger Kulon terjadi pda Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Sehingga yang awal mula status desa maju pada tahun 2017 menjadi desa berkembang. Namun pada tahun 2018 juga hasil pemutakhiran data Indeks
- program tersebut memiliki kemampuan dan keinginan tetap saja ada beberapa kendala.
- penurunan menjadi desa maju. Faktor penurunan tersebut terjadi pada Indeks Ketahanan Sosial (IKS) di Desa Puger Kulon. Sedangkan pada tahun 2018 Desa Puger Kulon mengalami peningkatan menjadi Desa mandiri lagi dengan faktor yang membuat meningkat yaitu pada Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Desa Membangun (IDM) Desa Puger Wetan mengalami kenaikan pula, kenaikan ini terjadi pada Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan dapat merubah status Desa Puger Kulon menjadi maju kembali.

8. Hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) berpengaruh terhadap dana desa yang diperoleh oleh setiap desa. Sehingga hasil data ini merupakan seperti laporan desa tentang penggunaan dana desa yang diperoleh. Jika dana desa tidak dipergunakan untuk mengembangkan desanya berarti desa tersebut tidak bisa mengelola dengan baik.
9. Peneliti menarik kesimpulan dari semua hasil data maupun wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan saling berkaitan satu sama lain. Dimana ada beberapa

fasilitas baik sosial, ekonomi maupun lingkungan dari salah satu Desa tidak ada di Desa satunya ada. Seperti halnya lapangan (alun-alun) dalam administrasi fasilitas lapangan tersebut milik Desa Puger Kulon namun dalam penggunaannya Desa Puger Wetan juga ikut menggunakan. Hal itu disebabkan karena Desa Puger Wetan tidak memiliki lapangan desanya sehingga untuk kegiatan atau aktifitas olahraga masyarakat Desa Puger Wetan ikut menggunakan lapangan milik Desa Puger Kulon. Dengan melihat hal tersebut peningkatan status maju Desa Puger Wetan dilihat pula dengan status mandiri Desa Puger Kulon. Jika status Desa Puger Kulon meningkat tentu saja Desa Puger Wetan meningkat. Hanya saja Desa Puger Wetan tidak akan bisa menjadi desa mandiri dikarenakan fasilitas yang lengkap hanya terdapat di

Desa Puger Kulon. Faktor yang lain juga dikarenakan jumlah penduduk Desa Puger Kulon lebih besar daripada Desa Puger Wetan yang hanya 2 (dua) dusun saja.

9.2.Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, peneliti memiliki beberapa saran agar program pengembangan desa maju mandiri di Kabupaten Jember terutama di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan berjalan dengan baik. Saran tersebut antara lain :

1. Komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan Desa lebih diperkuat dan diperbaiki lagi agar jika ada kegiatan seperti ini lagi tidak ada yang tidak datang dan agar jika ada pelaksanaan kegiatan seperti program tersebut lagi sesuai dengan harapan dan berjalan dengan lancar tanpa kendala.
2. Melihat dengan banyaknya desa yang ada di Kabupaten Jember, sumberdaya yang ada di Dinas ditambah

karena jika hanya mengandalkan bidang pemerintahan desa saja peneliti rasa tenaga kurang jika ada kegiatan yang besar seperti program pengembangan desa maju dan mandiri.

3. Melihat hasil data mulai dari 2016 sampai dengan 2018 di Desa Puger Kulon maupun Puger Wetan, diharapkan untuk pendamping lokal desa terus memantau dan mendampingi desa untuk mengembangkan dan menguatkan kemajuan maupun kemandirian desa tersebut. Agar tidak terjadi lagi masalah penurunan baik di Indeks Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi maupun Ketahanan lingkungannya.
4. Diharapkan pula untuk Desa Puger Kulon maupun Desa Puger Wetan untuk membenahi dan menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakatnya. Karena hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM)

berpengaruh dalam perolehan Dana Desa. Meskipun dari data sudah berstatus maju dan mandiri peneliti melihat masih ada beberapa fasilitas seperti infrastruktur jalan masih ada yang rusak dan tentunya membahayakan pengguna jalan.

5. Seharusnya Dinas Pembedayaan Masyarakat Dan Desa dengan pendamping Desa lebih aktif terutama di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan untuk memberikan penyuluhan atau pendampingan usaha dan memberikan mitra agar produk dari desa seperti trasi dan krupuk mampu berkembang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

AG, Subarsono. *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan*

Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Harjo, B. (2017). *Model Membangun Desa Mandiri*. Saburai Vol 2 No.1 28-35. Retrieved December 14, 2018, from <http://www.jurnal.saburai.ac.id/index.php/jshs/article/view/106>

Dicky Julian Tri, P. (2016). *Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Publika Vol 4 No.2. 1-9. Retrieved December 14, 2018, from <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14053>

Agustinus Tonga Liza, Abdul Hakim, dan Bambang Santoso Haryono. (2014). *Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)*. Wacana Vol 17 No.1.1-10. Retrieved December 14, 2018, from

<https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/296>

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi. Direktorat Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Republik Indonesia. *Standar operasional prosedur (SOP) pematkhiran*

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Tim publikasi kata data. (2018, December 17). *Puluhan ribu desa tertinggal berubah jadi desa berkembang*. Retrieved December 20, 2018, from <https://www.katadata.co.id/>

status perkembangan desa indeks desa membangun (IDM). Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi: Jakarta, 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. *Perubahan rencana strategis (Renstra) 2016-2021*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa: Jember, 2017

La Ode Yusran. (2017, 13 April). *Review Buku Edward III Implementing Public Policy*. Dikutip 23 Februari 2019 dari La Ode Yusran: <http://laodeyusron.blogspot.com/2017/04/review-buku-edward-iii-implementing.html>.

Kuisisioner Hasil Pematkhiran Data Indeks Desa Membangun Desa Puger Kulon Dan Desa Puger Wetan Tahun 2018